

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya dan tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pengelolaan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. (Riani, 2015).

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategik dalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, mengingat pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran (Yulianti dkk, 2014).

Informasi anggaran membantu manajemen puncak untuk mengevaluasi kinerja dari manajer fungsional dan mendistribusikan penghargaan (*rewards*) dan hukuman (*punishments*). Dalam konteks ini, keberadaan anggaran menjadi penting sebagai bagian dari perancangan sistem organisasi untuk meningkatkan sikap dan kinerja manajerial. Anggaran juga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja karena sistem penganggaran dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan perusahaan (Kaltsum dan Rohman , 2012). Kejelasan sasaran

anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Yulianti dkk, 2014).

Pengendalian intern dalam suatu organisasi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pengendalian intern bertujuan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi/instansi pemerintah. Pada prakteknya kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktek-praktek penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan aparat pemerintah, hal ini menurunkan kualitas pelayanan publik yang disisi lainnya sudah merupakan sorotan. Kondisi ini tidak terlepas dari masih buruknya mekanisme pengawasan, masih kurangnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya pengendalian intern. Praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maraknya kasus gratifikasi dan kasus suap

menunjukkan belum kuatnya integritas dan nilai etika pada pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Didalam akuntansi, pengendalian intern yang berlaku dalam organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya auditor meletakkan kepercayaan atas efektifitas pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi (Tresnawati, 2012). Untuk menjamin bahwa anggaran yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu diterapkan pengendalian. Pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Primayoni dkk, 2014).

Kinerja instansi pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkat setelah adanya desentralisasi, pengambilan keputusan organisasi harus mengadopsi pengendalian-pengendalian yang diperlukan, salah satunya dengan pengendalian akuntansi. Menurut Setyawan (2017), sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini

yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Tujuan informasi akuntansi untuk pemakainya adalah meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik. Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi.

Menurut Heptariani (2013) pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran tersebut. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Dalam keberhasilan akuntabilitas kinerja sektor publik dibutuhkan kejelasan sasaran anggaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh kejelasan saasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal, pengendalian akuntansi,

dan sistem pelaporan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian Primayoni (2014) telah dikaji tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herawaty (2011), hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015), Primayoni (2014), dan Tresnawati (2011) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017), Razi (2017), dan Yulianti (2014) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahid (2016) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhaesti (2016) yang menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam hal ini peneliti mengambil badan daerah untuk dijadikan sampel penelitian yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditinjau dari kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menguji bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk menguji bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk menguji bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah.

